

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar memerlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri tanpa harus bergantung pada bantuan dan pinjaman luar negeri. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan menyebutkan bahwa:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Self Assessment System adalah suatu pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak yang terutang.

Ciri-Cirinya *Self Assessment System* Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutang ada pada wajib Pajak sendiri, Wajib pajak aktif mulai dari menghitung menyetor dan melapor sendiri Pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Yang diterapkan di Indonesia masih memungkinkan timbulnya banyak kecurangan dalam kaitan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi semua wajib pajak, dimana memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak (WP) untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri atas

kewajiban pajaknya. Sistem perpajakan ini sangat memerlukan kejujuran dari WP dalam menghitung pajak terhutang dan harus dibayar melalui pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada wajib pajak tersebut. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan upaya penegakan hukum, yang salah satunya diwujudkan dengan pengenaan sanksi di bidang perpajakan. Sebagai perwujudan bentuk pengawasan dan pembinaan, kegiatan pemeriksaan pajak dilaksanakan dari waktu ke waktu dan berkesinambungan.

Walaupun pemungutan pajak menganut system *self-assessment* (akan tetapi dalam rangka pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak masih dapat mengeluarkan ketetapan pajak yang merupakan komponen *official assessment* Titik tolak penelitian maupun pemeriksaan pajak, adalah pemberitahuan pajak yang dilakukan sendiri oleh Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak (Pajak Penghasilan) yang disampaikan Wajib Pajak pada setiap akhir tahun pajak.

“Penegakan hukum (*law enforcement*) dilakukan dengan pemeriksaan, penyidikan dan penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan dan pemotongan, pemungutan, serta penyetoran pajak oleh wajib pajak yaitu dengan menekankan bahwa pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh wajib pajak yang diperiksa. Pendapat tersebut diatas menunjukkan bahwa

pemeriksaan pajak merupakan bagian vital dari fungsi pengawasan dalam *Self Assessment System*. Tujuan pemeriksaan adalah menguji kebenaran pajak terutang yang dilaporkan wajib pajak berdasarkan data, informasi, dan bukti pendukung. Dalam meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak diperlukan keadilan dan keterbukaan dalam menerapkan ketentuan perpajakan, kesederhanaan ketentuan perpajakan dan prosedur perpajakan dengan pelayanan prima terhadap wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakan disamping pengawasan dan penegakan hukum diatas.

Namun seringkali pendapat yang terlontar oleh wajib pajak adalah mereka merasa terintimidasi dan tertekan ketika mereka diperiksa oleh petugas pajak. Menurut pendapat saya, salah satu factor yang menyebabkan hal tersebut adalah adanya ketidaktahuan dan ketidakpahaman wajib pajak mengenai hak dan kewajibannya selama dilakukan pemeriksaan pajak. Akibatnya mereka merasa diperlakukan tidak adil.

Pemeriksaan yang diharapkan dapat membuat wajib pajak menjadi sadar dan patuh atas kewajiban perpajakannya tanpa menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan tidak pada aturannya karena telah dijelaskan bahwa wajib pajak memiliki hak atas pemeriksaan yang dilakukan. Serta dalam pelaksanaannya telah diatur jelas dengan berbagai tahap-tahap sebagai langkah nyata dalam melakukan pemeriksaan pajak. Hal ini muncul tidak lain karena adanya pengaruh atas system perpajakan yang kita anut, tidak dipungkirinya hadir pendapat-pendapat yang membuat wajib pajak menjadi “enggan” atau tidak mau membayar pajak dengan alasan yang sering kali mengada-ngada artinya ketidakpahaman wajib pajak dalam prosesnya membuat penerapan system ini menjadi tidak menyeluruh.

Namun pemerintah tidak hanya diam dalam menanggapi masalah tersebut, jika ada sebab maka ada akibat yang ditimbulkannya. Pemeriksaan adalah langkah yang dilakukan oleh pemerintah khususnya petugas pajak dalam hal ini untuk menyelesaikan masalah perpajakan yang timbul dimasyarakat. Seperti yang sering kita dengar bahwa banyak orang tidak mau membayar pajak dengan beribu alasan tanpa mengerti maksud dan tujuan perpajakan itu sendiri, dengan dilakukannya pemeriksaan sesuai dengan ruang lingkupnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak dalam tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Tanpa lupa memperhatikan kriteria-kriteria dalam pemeriksaan untuk mengukur kepatuhan wajib pajak yang menjadi dasar dalam menilai kepatuhan itu, dan juga jenis pemeriksaan yang dilakukan agar sesuai dengan kondisi dan prosedur yang ada. Kesemua hal diatas dilakukan semata-mata hanya untuk mentertibkan kewajiban perpajakan yang selama ini masih diabaikan oleh sebagian pihak, memberikan edukasi kepada wajib pajak yang mana masih dibingungkan dengan banyak peraturan yang tidak mereka mengerti.

Sebagian orang juga menganggap masih banyak keraguan akan proses pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas pemeriksa pajak pengukuran efektivitas pemeriksaan diukur dari penilaian terhadap kemampuan pemeriksa mendeteksi pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak secara sengaja dan penilaian terhadap proses pemeriksaan pajak sebagai rangkaian langkah yang direncanakan dan terorganisir dengan baik. Berdasarkan hasil penelitian ini, berarti pemeriksaan belum mampu mendeteksi pelanggaran yang dilakukan

oleh wajib pajak secara sengaja dan rangkaian langkah dalam pemeriksaan belum direncanakan dan terorganisir dengan baik. Akibatnya dari segi efektivitas pemeriksaan, tidak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan teori atribusi, sanksi perpajakan merupakan penyebab eksternal yang mempengaruhi persepsi seseorang wajib pajak dalam membuat penilaian mengenai perilaku kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Berdasarkan teori pembelajaran sosial, wajib pajak dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman, langsung melalui pemberian sanksi yang dikenakan aparat pajak kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan.

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang-orang yang melanggar peraturan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau undang-undang tidak dilanggar.

Arum (2012) apabila kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum bisa terjadi karena pajak mengandung unsur pemaksaan. Penerapan sanksi perpajakan bertujuan untuk memberi efek jera kepada wajib pajak yang melanggar norma perpajakan sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan.

Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Perpajakan disebut ada dua macam sanksi. Yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Dari hal tersebut penulis tertarik untuk mengambil sebuah penelitian yang akan dituangkan dalam judul **“Mekanisme Pemberian Sanksi Wajib Pajak Badan yang Tidak Memenuhi Kewajiban PPN di KPP Pratama Pangkalan Kerinci.”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka masalah yang dapat diidentifikasi di dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Mekanisme sanksi perpajakan yang diterapkan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci terhadap wajib pajak badan yang tidak mematuhi kewajiban PPN?
2. Bagaimana cara penerapan sanksi atas ketidak patuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya di bidang PPN pada KPP Pratama Pangkalan Kerinci?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui sanksi perpajakan yang diterapkan oleh KPP Pratama Pangkalan Kerinci terhadap wajib pajak badan yang tidak mematuhi kewajiban perpajakannya di bidang PPN
2. Untuk mengetahui cara penerapan sanksi perpajakan atas ketidakpatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya di bidang PPN.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Dapat memberikan informasi yang berguna bagi ilmu pengetahuan khususnya di bidang perpajakan Indonesia
2. Sebagai bahan masukan kepada peneliti untuk menambah wawasan mengenai proses penyampaian SPT yang berlaku di Indonesia
3. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat tentang sanksi yang dijatuhkan terhadap wajib pajak badan yang tidak memenuhi kewajibanya.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci

1.4.2 Waktu Penelitian

Waktu penelitian penulisan direncanakan 3 bulan mulai 02 Januari sampai 30 April 2014.

1.4.3 Jenis Data

1.4.3.1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh penulis melalui Quisioner

1.4.3.2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk laporan, catatan dan dokumen dari kantor tempat penelitian.

1.4.4 Teknik Pengumpulan Data

1.4.4.1. Observasi

Teknik pengumpulan data penulis melakukan dengan cara mengamati langsung di KKP PRATAMA PANGKALAN KERINCI tentang sanksi yang diberikan kepada wajib pajak.

1.4.4.2. Kuesoiner

Pengumpulan data penulis melalui kuesoiner kepada Kepala Kantor dan Staf-staf atau pegawai yang berada di KPP PRATAMA PANGKALAN KERINCI sehingga memberi informasi bermanfaat bagi penelitian.

1.4.5 Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, langkah selanjutnya yaitu mengadakan analisis. Dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif adalah sebuah data yang dinyatakan dalam bentuk bukan angka.

1.5 Sistematika Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan ini, terdapat beberapa bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan deskriptif atau gambaran umum Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalan Kerinci, uraian tugas masing-masing Seksi yang ada di KPP PRATAMA

PANGKALAN KERINCI, serta struktur unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama pangkalan kerinci.

BAB III : TINJAUAN TEORI

Pada bab ini diuraikan pengertian Perpajakan, pengertian Saksi perpajakan, saksi yang dijatuhkan terhadap wajib pajak, Pajak pertambahan nilai'

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan inti sari yang bersumber dari hasil penelitian, dan berdasarkan kesimpulan dapat dibuat rekomendasi yang berisikan saran-saran yang diambil sebagai tindakan untuk mengatasi masalah yang diemukan di lokasi penelitian

DAFTAR PUSTAKA